



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANJARNEGARA

WWW.BPPKAD.BANJARNEGARAKAB.GO.ID

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 BPPKAD KAB. BANJARNEGARA

2024

BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH



Jalan Ahmad Yani No. 3
Banjarnegara, 53418
(0286) 591081

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	8
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	40
BAB IV PENUTUP.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan

yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

- dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
 28. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
 29. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Perubahan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk :

- a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD-P Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;

- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan semester I tahun berjalan dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 4 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Semester 1 Tahun 2024

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Pertanahan dan Urusan Keuangan.

Renja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari 5 program, 15 kegiatan, dan 54 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 496.882.436.873,00 dengan fokus utama pada pemantapan system dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi dan keadilan serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Jumlah bidang tanah yang dimiliki Pemkab Banjarnegara setiap tahun cenderung berubah dan bertambah sehingga belum seluruhnya tanah Pemkab bersertifikat.
2. Persentase Rasio Kemandirian daerah yang relative masih rendah sehingga ditempuh kebijakan menggali potensi pendapatan daerah yang ada pada tahun 2024.

Dari 5 program, 15 kegiatan, dan 54 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 5 program, 15 kegiatan, dan 54 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.496.882.436.873,00. Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu,

penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 5 program, 15 kegiatan, dan 51 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 501.870.620.158,00 Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, program/kegiatan/subkegiatan yang bertambah/berkurang meliputi 5 program 15 kegiatan dan 54 sub kegiatan.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2024 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah sampai dengan semester 1 tahun 2024 disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2024* Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Semester I)		
			Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan				
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Luas Tanah Pemkab yang bersertifikat	70%	68,85%	98,35%
2.10.10.1.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan penggunaan tanah pemkab yang disusun	100%	80%	80%
2.10.10.1.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 Kabupaten/Kota	1 Laporan	-	-
5.2	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
5.2.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	50%	50%
5.2.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD yang disusun tepat waktu	12 dok	8 dok	66,67%
5.2.1.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	4 dok	66,67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Semester I)		
			Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
5.2.1.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dok	4 dok	66,67%
5.2.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	100%	50%	50%
5.2.1.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 orang	60 orang	100%
5.2.1.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	150 dok	75 dok	50%
5.2.1.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/tri-wulanan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan keuangan bulanan/tri-wulan dan semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 dok	2 dok	50%
5.2.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase sumber daya aparatur pengelola keuangan yang paham penatausahaan keuangan	100%	11,11%	11,11%
5.2.1.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	9 orang	1 orang	11,11%
5.2.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100%	50%	50%
5.2.1.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	6 paket	50%
5.2.1.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket Bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	6 paket	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Semester I)		
			Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
5.2.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penambahan jumlah BMD	100%		
5.2.1.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaran dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0 unit	0 unit	0%
5.2.1.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	106 unit	0 unit	0%
5.2.1.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase jasa pelayanan umum kantor, surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi</i>	100%		
5.2.1.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	- lap	- lap	
5.2.1.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 lap	6 lap	50%
5.2.1.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan	12 lap	6 lap	50%
5.2.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang terfasilitasi	100%	50%	50%
5.2.1.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	50 unit	25 unit	50%
5.2.1.2.09.10	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung dan peralatan kantor yang dipelihara	30 unit	15 unit	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Semester I)		
			Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
5.2.2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu;	100%	50%	50%
		Persentase Serapan dana Transfer	100%	51,39%	51,39%
5.2.2.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	Persentase Capaian Penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengelolaan dana transfer	100%	50,00%	50,00%
5.2.2.2.02.01	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 dok	6 dok	50%
5.2.2.2.02.03	Penyiapan, pelaksanaan, pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan dan SPD	44 dok	44 dok	50%
5.2.2.2.02.05	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5 dok	2 dok	40%
5.2.2.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5 dok	2 dok	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Semester I)		
			Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
5.2.2.2.02.11	Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah Kabupaten	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan pemerintah Kabupaten/ Kota	44 orang	44 orang	100%
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah	Tepat waktu	Tepat waktu	100%
5.2.2.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu	100%	100%	100%
5.2.2.2.03.01	Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Jumlah laporan Hasil koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 lap	6 lap	50%
5.2.2.2.03.03	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	4 lap	2 lap	50%
5.2.2.2.03.04	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	44 lap	44 lap	50%
5.2.2.2.03.05	Koordinasi dan penyusunan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten	Jumlah Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	1 dok	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Semester I)		
			Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
5.2.2.2.03.07	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	1 dok	-	-
	Program Pengelolaan Keuangan daerah	Ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat waktu		
5.2.2.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun	100%	40%	-
5.2.2.2.01.01	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 dok	1 dok	50%
5.2.2.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun	2 dok	1 dok	50%
5.2.2.2.01.03	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	44 dok	44 dok	100%
5.2.2.2.01.04	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	44 dok	-	-
5.2.2.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dok	-	-
5.2.2.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Raperda dan Raperbup Perubahan APBD	2 dok	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Semester I)		
			Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
5.2.2.2.01.07	Pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran Daerah pemerintah Kabupaten/Kota	44 orang	44 orang	100%
5.2.2.2.04	<i>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	<i>Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan</i>	100%		
5.2.2.2.04.01	Analisis Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Analisis Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Daerah	1 lap		
5.2.2.2.04.08	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah Laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	100%	100%	100%
5.2.2.2.04.09	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana darurat dan Mendesak	1 lap	0 lap	-
5.2.2.2.04.10	Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten	Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
5.2.2.2.05	<i>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</i>	<i>Persentase sistem informasi keuangan daerah yang dipelihara</i>	100%	50%	
5.2.2.2.05.03	Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	44 orang	44 orang	100%
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu	100%	50%	50%
5.02.03.2.01	<i>Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	<i>Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun</i>	100%	50%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Semester I)		
			Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah SSH yang disusun	1 Dokumen	Dokumen	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Laporan	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	laporan	
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan BMD	1 Laporan	Laporan	
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50%
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	5%	0,79%	15,80%
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	5%	227,91%	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah.	4 Dokumen	1 Dokumen	25%
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	4 Laporan	2 Laporan	50%
5.02.04.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	130 unit	0 unit	0%
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 laporan	Laporan	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Semester I)		
			Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
5.02.04.2.01.05	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 laporan	laporan	0%
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya	730.000 OP	415 OP	0%
5.02.04.2.01.05	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah doklumen ketetapan pajak daerah	1 dokumen	Dokumen	0%
5.02.04.2.01.05	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	750 Layanan	3.167Layanan	422%
5.02.04.2.01.05	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	5 dokumen	3 Dokumen	60%
5.02.04.2.01.05	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	2 dokumen	1 dokumen	500%
5.02.04.2.01.05	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 laporan	2 laporan	50%
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 laporan	2 laporan	50%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 8 Indikator. Dari 8 indikator tersebut, semuanya berstatus tercapai Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Monitoring dan Evaluasi serta penagihan pajak;
2. Penyampaian Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu;
3. Pembinaan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Dalam hal kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak atas kewajibannya sehingga perlu dilakukan penagihan serta monitoring dan evaluasi;
2. Bagi OPD yang penyusunan Laporan Keuangannya belum tepat waktu dilakukan pendampingan agar tersusun tepat waktu;
3. OPD yang belum tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah dilakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
URUSAN PERTANAHAN												
1	Persentase Tanah Yang Bersertifikat		IKK	43.14%	50.72%	58.30%	65.88%	70,14%	68,08%	70%	50.72%	
2	Prosentase kepastian hukum, pengusaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		IKK					107,91%	0%	-	-	
URUSAN KEUANGAN												
1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah / Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)		LPPD					13,94%	15,57%			
2	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		IKK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
3	Persentase pertumbuhan PAD		IKK	5%	5%	5%	5%	-9,32%	17,92%	5%	5%	
4	Persentase pertumbuhan Pajak dan Retribusi		IKK	5%	5%	5%	5%	27,12%	8,63%	5%	5%	
5	Penetapan APBD tepat waktu		IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Kegiatan dalam KUA PPAS yang terakomodir dalam APBD		IKK	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	
7	Persentase penerbitan SP2D tepat waktu		IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
8	Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan SAP yang terselesaikan tepat waktu		IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Tingkat penyerapan DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi		IKK	100%	100%	100%	100%	105,90%	117,36%	100%	100%	
10	Jumlah Pendapatan BUMD yang disetor ke Kas Daerah		IKK					17,259. miliar	18,112 miliar			
11	Persentase satker yang telah mengimplementasikan SIMDA BMD		IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Persentase Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan		LPPD					26.13%	28.14%			
13	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)		LPPD					65.81%	62.83%			
14	Budget execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD		LPPD					4.94%	6.95%			
15	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD		LPPD					9.14%	1.63%			
16	Persentase SILPA		LPPD					4,15%	3,65%			

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 2 urusan, yaitu urusan Pertanahan dan Urusan Keuangan. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mencakup 2 urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah yang berimplikasi pada rendahnya kemandirian keuangan daerah;
2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan asset daerah terutama asset tanah yang bersertifikat.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Ketergantungan anggaran terhadap pemerintah pusat;
2. Belum ada kepastian hukum terhadap tanah Pemkab yang belum bersertifikat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Tantangan dalam meningkatkan rasio kemandirian daerah yaitu target peningkatan pendapatan daerah dalam upaya mendorong pada perwujudan kemandirian daerah memberikna motivasi besar bagi BPPKAD untuk membangun strategi yang efektif dalam meningkatkan potensi-potensi daerah. Sedangkan peluang dalam meningkatkan rasio kemandirian daerah adalah besarnya potensi-potensi

pendapatan daerah yang belum terolah secara optimal memberikan peluang bagi BPPKAD untuk lebih kreatif dalam melakukan penggalan sumber-sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2024. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah yang berimplikasi pada rendahnya kemandirian keuangan daerah;
2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan asset daerah terutama asset tanah yang bersertifikat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun kedua RPD Tahun 2023-2026. Dalam RPD Tahun 2023-2026, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024 yaitu Pemantapan system dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam mendukung tugas dan fungsi BPPKAD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Persentase Luas Tanah Pemkab yang bersertifikat	70%	399.600.000,00	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Persentase Luas Tanah Pemkab yang bersertifikat	50.72%	399.600.000,00	
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten / Kota		Persentase dokumen perencanaan penggunaan tanah Pemkab yang disusun	100%	399.600.000,00	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten / Kota		Persentase dokumen perencanaan penggunaan tanah Pemkab yang disusun	100%	399.600.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam satu Kabupaten/ Kota	1 Laporan	399.600.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam satu Kabupaten/ Kota	1 Laporan	399.600.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	32.566.823.196,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	32.566.823.196,00	
	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD yang disusun tepat waktu	12 Dokumen	27.000.100,00	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD yang disusun tepat waktu	12 Dokumen	27.000.100,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	15.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	15.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	12.000.100,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	12.000.100,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	100%	12.289.131.215,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	100%	12.953.580.244,00	
	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang	12.060.053.715	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang	12.754.502.744,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	150 Dokumen	225.077.500,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	150 Dokumen	225.077.500,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen Laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4 Dokumen	4.000.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen Laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4 Dokumen	4.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase sumber daya aparatur pengelola keuangan yang paham penatausahaan keuangan	100%	40.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase sumber daya aparatur pengelola keuangan yang paham penatausahaan keuangan	100%	40.000.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah orang yang mengikuti bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20 Orang	40.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah orang yang mengikuti bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20 Orang	40.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100%	747.669.500,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100%	828.892.500,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	32.990.400,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	32.990.400,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket Bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	714.679.100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket Bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	795.902.100,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penambahan jumlah BMD	100%	154.713.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penambahan jumlah BMD	100%	154.713.000,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0 Unit	0,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	3 Unit	80.000.000,00	

No	Rancangan Awal RPKD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	106 Unit	154.713.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	106 Unit	164.320.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase jasa pelayanan umum kantor, surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100%	18.879.525.067,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase jasa pelayanan umum kantor, surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100%	18.823.093.643,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	0 Laporan	0,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	0 Laporan	0,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	18.185.268.067,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	18.128.835.643,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	694.257.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	694.257.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang terfasilitasi	100%	428.784.314,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang terfasilitasi	100%	428.784.314,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	50 Unit	182.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	50 Unit	182.000.000,00	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah gedung dan peralatan kantor yang dipelihara	30 Unit	246.784.314,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah gedung dan peralatan kantor yang dipelihara	30 Unit	246.784.314,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu	100%	465.852.060.976,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu	100%	488.817.313.900,00	
			Persentase serapan dana transfer daerah	100%				Persentase serapan dana transfer daerah	100%		
			Persentase Penyusunan laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu	100%				Persentase Penyusunan laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu	100%		
			Persentase Penyusunan Penganggaran yang tepat waktu	100%				Persentase Penyusunan Penganggaran yang tepat waktu	100%		
			Kesuaian Program dalam APBD dg yang ada di RKPD	>90%				Kesuaian Program dalam APBD dg yang ada di RKPD	>90%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun	100%	716.887.976,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun	100%	783.334.900,00	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	20.000.976,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	20.000.900,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	20.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	20.000.000,00	
	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi RKA-SKPD		Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	44 Dokumen	5.800.000,00	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi RKA-SKPD		Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	44 Dokumen	5.800.000,00	
	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	44 Dokumen	5.800.000,00	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	44 Dokumen	5.800.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	579.246.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	635.683.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Dokumen Raperda dan Raperbup Perubahan APBD	2 Dokumen	66.040.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Dokumen Raperda dan Raperbup Perubahan APBD	2 Dokumen	76.040.500,00	
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran Daerah pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	20.000.000 ,00	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran Daerah pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	20.000.000,00	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloan dana transfer	100%	292.900.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloan dana transfer	100%	292.900.000,00	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	55.000.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	55.000.000,00	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan dan SPD	44 Dokumen	45.500.000,00	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan dan SPD	44 Dokumen	45.500.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Koordinasi Fasilitas, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Jumlah dokumen hasil Koordinasi Fasilitas, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	7 Dokumen	25.000.000,00	Koordinasi Fasilitas, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Jumlah dokumen hasil Koordinasi Fasilitas, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	7 Dokumen	25.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		Jumlah laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	27 Laporan	58.400.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		Jumlah laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	27 Laporan	58.400.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Pembinaan dan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota		Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	109.000.000,00	Pembinaan dan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota		Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	109.000.000,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan	100%	333.000.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan	100%	333.000.000,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		Jumlah laporan Hasil koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	35.000.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		Jumlah laporan Hasil koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	35.000.000,00	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran	4 Laporan	20.000.000,00	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran	4 Laporan	20.000.000,00	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	44 Laporan	102.000.000,00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	44 Laporan	102.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/ Kota		Jumlah Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	166.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/ Kota		Jumlah Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	166.000.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	1 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	1 Dokumen	10.000.000,00	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan	100%	460.369.273.000,00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan	100%	467.271.584.000,00	
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 laporan	200.000.000,00	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	200.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Jumlah Laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	1 Laporan	439.136.836.000,00	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Jumlah Laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	1 Laporan	439.626.410.000,00	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana darurat dan Mendesak	1 Laporan	9.000.000.000,00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana darurat dan Mendesak	1 Laporan	9.000.000.000,00	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	1 Laporan	16.032.437.000,00	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	1 Laporan	18.445.174.000,00	
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Persentase sistem informasi keuangan daerah yang dipelihara	100%	140.000.000,00	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Persentase sistem informasi keuangan daerah yang dipelihara	100%	136.495.000,00	
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	44 Orang	140.000.000,00	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	44 Orang	35.078.800,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu	100%	800.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu	100%	842.400.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun	100%	800.000.000,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun	100%	842.400.000,00	
	Penyusunan Standard Harga		Jumlah SSH yang disusun	1 Dokumen	75.000.000,00	Penyusunan Standard Harga		Jumlah SSH yang disusun	1 Dokumen	75.000.000,00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	300.000.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	300.000.000,00	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan BMD	1 Laporan	75.000.000,00	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan BMD	1 Laporan	67.100.000,00	
	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik daerah	1 Dokumen	350.000.000,00	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik daerah	1 Dokumen	400.300.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase Pertumbuhan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	5%	2.288.975.900,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase Pertumbuhan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	5%	2.238.975.800,00	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan		Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	5%	2.288.975.900,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan		Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	5%	2.238.975.800,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah.	1 Dokumen	250.000.000,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah.	1 Dokumen	200.000.000,00	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	4 Laporan	112.000.000,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	4 Laporan	112.000.000,00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	738 Unit/ Box	160.247.200,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	738 Unit/ Box	160.247.200,00	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	120.000.000,00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	120.000.000,00	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	108.502.800,00	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	108.502.800,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Jumlah obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya	730.000 OP	50.000.000,00	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Jumlah obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya	730.000 OP	50.000.000,00	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah doklumen ketetapan pajak daerah	1 Dokumen	829.317.400,00	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah doklumen ketetapan pajak daerah	1 Dokumen	829.317.400,00	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	750 Layanan	80.658.500,00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	750 Layanan	80.658.500,00	
	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	5 Dokumen	385.500.000,00	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	5 Dokumen	385.500.000,00	
	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	2 Dokumen	100.000.000,00	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	2 Dokumen	100.000.000,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	72.750.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	72.750.000,00	
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	20.000.000,00	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	20.000.000,00	
	JUMLAH				501.869.860.072,00					505.673.960.601,00	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, belum terdapat hal yang menjadi catatan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah <i>Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>	Banjar negara	Persentase Penyusunan Penganggaran yang tepat waktu	43 usulan	

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah <i>Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>	Banjar negara	Persentase Penyusunan Penganggaran yang tepat waktu	433 usulan	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2023-2026 yang mengacu pada RPD Tahun 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pagu yang tersedia untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp 505.673.860.601,00 digunakan untuk membiayai 5 program, 15 kegiatan, dan 53 sub kegiatan.

Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan dapat di jabarkan sebagai berikut:

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- **Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 5 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan:

 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
 - d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;

- f. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - g. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan sub kegiatan:
- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
 - b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD;
 - c. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - e. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan:
- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;
 - b. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;
 - c. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
 - e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah;

- 4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - a. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
 - b. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
 - c. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;
 - d. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota;
- 5) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.
 - a. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

- **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan sub kegiatan yaitu:

- a. Penyusunan Standar Harga;
- b. Inventarisasi Barang;
- c. Pengamanan Barang Milik Daerah;
- d. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

- **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Dengan sub kegiatan yaitu:

- a. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
- b. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
- c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
- d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
- e. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;

- f. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- g. Penetapan Wajib Pajak Daerah;
- h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
- i. Penagihan Pajak Daerah;
- j. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
- k. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- l. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

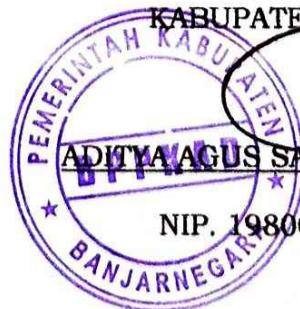
BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2023-2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal: 2024

Plt. KEPALA BPPKAD
KABUPATEN BANJARNEGARA


ADITYA AGUS SATRIA, M.Ec, Dev, MA, Ak, CA
Pembina
NIP. 19800903 200501 1 008



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANJARNEGARA

WWW.BPPKAD.BANJARNEGARAKAB.GO.ID

BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH



Jalan Ahmad Yani No. 3
Banjarnegara, 53418
(0286) 591081